KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembangunan Gedung Baru Dewan Distop Saja
Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pembangunan Gedung Baru Dewan Distop Saja...



Dimyati Natakusumah

WAKIL Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah setuju dengan langkah pemerintah melakukan moratorium terhadap pembangunan gedung baru kementerian dan lembaga.

Ia mengatakan, moratorium itu akan berlaku juga bagi DPR yang berencana membagun gedung baru dan enam proyek besar lainnya. "Rencana kita memang distop dulu," kata Dimyati di Kompleks Parlemen.

Dimyati mengakui, DPR saat ini memang membutuhkan gedung baru, khususnya untuk ruang kerja anggota. Sebab, ruangan anggota yang hanya berukuran sekitar 3 meter x 4 meter persegi dinilai tak cukup untuk menunjang produktivitas anggota Dewan beserta tujuh orang staf dan tenaga ahlinya.

Namun, untuk sementara waktu, DPR akan bertahan dengan kondisi itu hingga keuangan negara membaik dan kebijakan moratorium dicabut.

"Kita utamakan bangunan yang ada. Moratorium enggak jelek juga," ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Nantinya, lanjut Dimyati, dana yang sudah dianggarkan sebesar Rp 570 miliar di APBN 2016 untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi, dan klinik bisa ditarik saat pembahasan APBN Perubahan. Dana tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Ketua DPR Ade Komarudin tak mempersoalkan rencana moratorium gedung baru DPR. Kata dia, DPR akan mengikuti dan mendukung rencana Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium pembangunan gedung baru. "Kita kalau ada moratorium, harus ditaati," kata Ade.

Ade menyampaikan, persoalan moratorium proyek pembangunan gedung baru DPR ini secepatnya akan dikomunikasikan dengan segenap pimpinan fraksi dan pimpinan BURT DPR.

Yang pasti, tegas Ade, pihaknya mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah soal moratorium pembangunan gedung di kementerian dan lembaga. Apalagi, kata dia, tujuan moratorium tersebut guna melakukan penghematan anggaran.

"Kalau saya, tentu punya kehendak moratorium harus konsisten kita jalankan. Kita cara jalan keluar atasi kekurangan ruangan. Kekurangan ruangan kan tidak harus bangun, kita cari akal," tandasnya. ■ ONI

PERPUSTAKAAN DPR-RI